

KEMENTERIAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA



LAPORAN KINERJA 2023



SEKRETARIAT DEPUTI
PENGEMBANGAN PEMUDA

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT DEPUTI PENGEMBANGAN PEMUDA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga dapat menjalankan program-program yang telah direncanakan pada tahun 2023 dengan baik dan penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

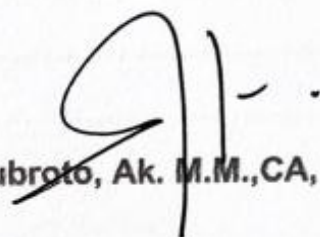
Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas yang berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban dan wujud transparansi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi, alat penilaian kinerja serta pemacu peningkatan kinerja organisasi.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Sekretariat Deputy Pengembangan Pemuda Tahun 2023, diharapkan dapat menggambarkan kinerja unit secara menyeluruh dengan hasil yang lebih baik dari tahun sebelumnya, sebagai pendorong untuk peningkatan kinerja yang lebih baik ditahun yang akan datang serta dapat mewujudkan *good governance* di lingkungan Sekretariat Deputy Pengembangan Pemuda.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja ini kami ucapkan terima kasih. Demikian Laporan Kinerja Sekretariat Deputy Pengembangan Pemuda ini disusun, semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak.

Jakarta, 15 Januari 2023

Sekretaris Deputy Bidang Pengembangan Pemuda



Subroto, Ak. M.M., CA, CRGP, QIA.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum.....	3
C. Struktur Organisasi.....	4
D. Personel Kepegawaian.....	5
E. Maksud dan Tujuan	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis	7
B. Visi dan Misi	7
C. Penetapan Kinerja	8
D. Pengukuran Kinerja	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
A. Capaian Kinerja Organisasi	16
B. Evaluasi Dan Capaian Analisis Kinerja.....	23
C. Kendala dan Solusi.....	47
BAB IV PENUTUP	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran	49
LAMPIRAN – LAMPIRAN	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1. PK Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	vi
Tabel 2. Personel Kepegawaian Sekretariat	6
Tabel 3. Perjanjian Kinerja	8
Tabel 4. Pemetaan Target Kinerja dengan Kegiatan Pendukung pada.....	11
Tabel 5. Kategori Capaian Kinerja.....	16
Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja	18
Tabel 7. Capaian Kinerja Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda....	21
Tabel 8. Target Capaian Kinerja Persentase pengisian SIRUP	23
Tabel 9. Perbandingan Nilai Presentase SiRUP	24
Tabel 10. Target Capaian Kinerja Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran.....	24
Tabel 11. Perbandingan Nilai IKPA	25
Tabel 12. Target Capaian Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2023	26
Tabel 13. Tabel Perbandingan Nilai Kinerja Tahun 2021, 2022, dan 2023	27
Tabel 14. Target Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023	27
Tabel 15. Kegiatan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	28
Tabel 16. Perbandingan Nilai E-SKM Deputi Bidang Pengembangan Pemuda....	29
Tabel 17. Target Capaian Kinerja Rata-rata nilai hasil pengawasan kearsipan	30
Tabel 18. Rekapitulasi Surat Masuk dan Surat Keluar Tahun 2023	30
Tabel 19. Perbandingan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	31
Tabel 20. Target Capaian Kinerja.....	31
Tabel 21. Target Capaian Kinerja Tingkat harmonisasi.....	32
Tabel 22. Produk Hukum tahun 2023.....	34
Tabel 23. Target Capaian Kinerja Persentase Serapan Anggaran tahun 2023.....	35
Tabel 24. Persentase Serapan Anggaran	35
Tabel 25. Target Capaian Kinerja Persentase Capaian Output tahun 2023.....	37
Tabel 26. Target Capaian Kinerja Persentase BMN.....	38
Tabel 27. Target Capaian Kinerja Persentase pegawai ASN	39
Tabel 28. Perbandingan Target dan Capaian Tahun 2022 dan 2023.....	39
Tabel 29. Kegiatan Pengembangan SDM	40
Tabel 30. Target Capaian Kinerja Nilai PM SAKIP tahun 2023.....	40

Tabel 31. Target Capaian Kinerja Persentase pengisian SIRUP	42
Tabel 32. Tabel Perbandingan Nilai Presentase SiRUP	42
Tabel 33. Target Capaian Kinerja Nilai hasil pengawasan kearsipan.....	43
Tabel 34. Rekapitulasi Surat Masuk dan Surat Keluar Tahun 2023	43
Tabel 35. Tabel Perbandingan Nilai Pengawasan Kearsipan	43
Tabel 36. Target Capaian Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.....	44
Tabel 37. Target Capaian Kinerja Persentase temuan LHP BPK	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi.....	4
Gambar 2. Rincian Penilaian dari Aplikasi ESMART.....	26
Gambar 3. Survei Kepuasan Pelayanan	28
Gambar 4. Jumlah dan Persentase Reponden dari Tiap Unit	29
Gambar 5. Data-data Hasil Kegiatan Keasdepan	32
Gambar 6. Gambar 2. Contoh Produk Hukum	33
Gambar 7. perbandingan Data Realisasi Anggaran	36
Gambar 8. Hasil Evaluasi Sakip Internal	41
Gambar 9. Perbandingan Nilai SAKIP Deputi Bidang Pengembangan Pemuda...41	
Gambar 10. Website Resmi Deputi Bidang Pengembangn Pemuda	44
Gambar 11. Perbandingan Data IKM 2022-2023	45
Gambar 12. Niali E-SKM Sekretariat Deputi Pengembangan Pemuda.....	45

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan tertib administrasi, setiap unit kerja sudah sepatutnya membuat laporan kinerja dalam mengukur capaian kinerja dalam satu periode. Laporan Kinerja (LKj) merupakan produk akhir yang menggambarkan kinerja yang dicapai atas pelaksanaan kegiatan dengan biaya berdasarkan siklus anggaran yang berjalan satu periode. Selain itu, dengan adanya dokumen Laporan Kinerja diharapkan dapat menentukan besaran kinerja dalam satuan jumlah atau persentase dan sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan kegiatan tahun mendatang.

Peng, ukuran akuntabilitas kinerja didasarkan pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Sekretaris Deputy Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2023. Dokumen perjanjian kinerja ini disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 dan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Sebagai unit kerja dalam lingkup Eselon II Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsi yang diwujudkan melalui keberhasilan dalam pencapaian sasaran maupun sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2023.

Adapun Perjanjian Kinerja (PK) Sekretaris Deputy Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2023 dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. PK Sekretaris Deputy Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	%	Kategori Capaian
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan organisasi pada Deputy Bidang Pengembangan Pemuda yang	Persentase pengisian SIRUP yang diumumkan pada Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	100%	93,22%	93,2%	Baik

berkinerja, bersih,
akuntabel dan
profesional.

IKPA pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	87	72.67	83.2%	Cukup
Nilai kinerja anggaran pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	90	87.07	96.7%	Baik
Indeks kepuasan masyarakat pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	90	79.49	90.3%	Baik
Rata-rata nilai hasil pengawasan kearsipan pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	70	82,08	117%	Sangat Baik
Persentase unit kerja yang memenuhi penyediaan data kepemudaan lingkup Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	100%	100%	100%	Sangat Baik
Tingkat harmonisasi dan penelaahan produk hukum pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	100%	100%	100%	Sangat Baik
Persentase serapan anggaran pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	99%	97.71%	98.7%	Baik
Persentase capaian output pada Deputi	95%	100%	105%	Sangat Baik

Bidang Pengembangan Pemuda				
Persentase BMN yang dilaporkan pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	100%	100%	100%	Sangat Baik
Persentase pegawai ASN yang diberikan pengembangan kompetensi pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	50%	91.3%	182%	Sangat Baik
Nilai PM SAKIP pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	70	78.18	111%	Sangat Baik
Persentase pengisian SIRUP yang diumumkan pada Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	100%	98.21%	98.2%	Baik
Nilai hasil pengawasan kearsipan internal pada Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	65	89.69	138%	Sangat Baik
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	90	81	90%	Baik

		Persentase temuan LHP BPK yang ditindak lanjuti pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	70%	100%	142%	Sangat Baik
--	--	--	-----	------	------	-------------

Dari hasil tersebut, disimpulkan bahwa capaian kinerja Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda pada tahun 2023 dihitung secara umum tercapai 96% atau berkategori Sangat Baik.

Adapun realisasi anggaran Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2023 adalah Rp 4,771,138,578,- (Empat Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) atau mencapai 95.42% dari anggaran sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah jo. Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKj atau sebelumnya disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, dimana pada Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tersebut mengatur bahwa setiap Entitas Akntabilitas Kinerja (wajib) menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

LKj berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup:

- a. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- b. Realisasi pencapaian target kinerja organisasi;
- c. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
- d. Pembandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis organisasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja (wajib) menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Entitas Akuntabilitas Kinerja tersebut menyelenggarakan SAKIP secara berjenjang, dengan tingkatan mulai dari entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja, entitas akuntabilitas kinerja unit Organisasi, hingga entitas akuntabilitas kinerja kementerian/kembaga.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKj, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

Penyusunan LKj diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format LKj pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi; rencana dan target kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja; dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi akhir yang seharusnya terwujud (termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya).

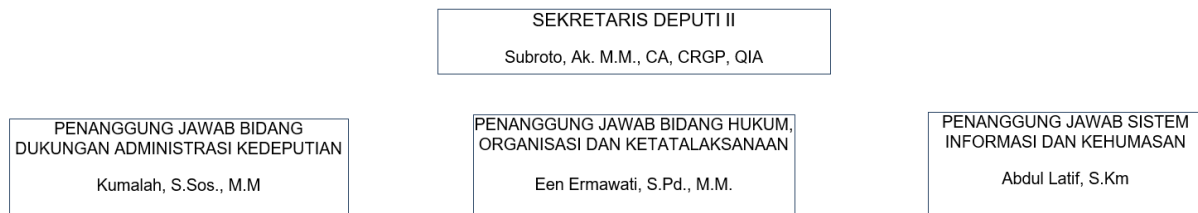
B. Dasar Hukum

Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda mengacu dan berpedoman pada regulasi yang mengatur dan terkait dengan Laporan Kinerja, antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Peraturan Presiden No. 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 57 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pemuda Dan Olahraga;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No 32 Tahun 2016 tentang Sentra Pengembangan Pemuda.

C. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEPUTI



Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda

Rincian Struktur Organisasi Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda terdiri atas:

1. Sekretaris Deputy
2. Penanggung Jawab yang terdiri atas ;
 - a. Penanggung Jawab Bidang Dukungan Administrasi Kedeputian
 - b. Penanggung Jawab Bidang Hukum, Organisasi Dan Ketatalaksanaan
 - c. Penanggung Jawab Sistem Informasi Dan Kehumasan
3. Penanggung Jawab Bidang Dukungan Administrasi Kedeputian , terdiridari ketua tim:
 - a. Ketua Tim Program dan Anggaran
 - b. Ketua Tim Penatausahaan BMN
 - c. Ketua Tim Pengelola Keuangan I
 - d. Ketua Tim Pengelolaan Keuangan II
4. Penanggung Jawab Bidang Hukum, Organisasi, dan Tatalaksana, terdiri dari ketua tim:
 - a. Ketua Tim Organisasi dan Ketatalaksanaan
 - b. Ketua Tim Hukum
 - c. Ketua Tim Pengelolaan SDM
5. Penanggung Jawab Sistem Informasi dan Kehumasan, terdiri dari ketua tim:
 - a. Ketua Tim Sistem Pengendalian Intern
 - b. Ketua Tim Pengelolaan Data dan Informasi
 - c. Ketua Tim Hubungan Masyarakat

Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda yang selanjutnya disebut Sekretariat Deputy II, mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga yakni melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Deputy II. Adapun fungsi Sekretariat Deputy II yaitu :

1. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, rencana strategis, rencana kerja Deputy;
2. koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern Deputy;
3. penatausahaan barang milik/kekayaan negara Deputy;
4. pengelolaan keuangan Deputy;
5. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, persuratan dan arsip, hukum, hubungan masyarakat, sistem informasi, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan Deputy;
6. penyusunan laporan Deputy; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy.

D. Personel Kepegawaian

Jumlah pegawai pada Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda berjumlah 29 orang dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Personel Kepegawaian Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda

No	Uraian	PNS	Honorar Lembaga
1	Sekretaris Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	1	-
2	Bidang Dukungan Administrasi Kedeputan	11	2
3	Bidang Hukum Organisasi dan Ketatalaksanaan	7	1
4	Bidang Sistem Informasi dan Kehumasan	7	-
Jumlah		26	3

E. Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2023 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran pada Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2023 adalah untuk memberikan capaian kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sesuai amanah RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Sasaran tersebut dicerminkan melalui Tema Pembangunan Nasional, yaitu Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan. Sejalan dengan sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 tersebut, telah merumuskan visi misi Deputy Bidang Pengembangan Pemuda dalam suatu Rencana Strategis Deputy Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2020-2024

B. Visi dan Misi

1. Visi

Visi Deputy Bidang Pengembangan Pemuda sejalan dengan visi Kementerian Pemuda dan Olahraga RI yakni :

"Kementerian Pemuda dan Olahraga yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam membentuk pemuda Indonesia yang berkualitas untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong"

Pemuda Berkualitas secara normatif memiliki karakteristik Kementerian Pemuda dan Olahraga yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam membentuk Pemuda Indonesia yang berkualitas, masyarakat yang berbudaya olahraga dan berprestasi olahraga untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.

2. Misi

Adapun misi Deputy Bidang Pengembangan Pemuda merupakan penjabaran misi yang digariskan Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2020-2024, yakni ;

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pembangunan kepemudaan dalam rangka mewujudkan pemuda berkualitas.;

- b. Mengkoordinasikan dan mensinkronkan pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan pemuda berkualitas;
- c. Mengawasi penyelenggaraan pembangunan bidang kepemudaan guna mendukung pencapaian pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
- d. Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta dan kerja sama bidang kepemudaan pada tingkat internasional;
- e. Meningkatkan inovasi dan peningkatan penggunaan teknologi sebagai basis dalam pembangunan kepemudaan;
- f. Meningkatkan tata kelola kelembagaan, kompetensi ASN, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi, dan peningkatan kecepatan pelayanan publik.

C. Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja adalah pernyataan Komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK). Dokumen ini merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan organisasi pada Deputy Bidang Pengembangan Pemuda yang berkinerja, bersih, akuntabel dan profesional.	Nilai penilaian mandiri pelaksanaan RB pada Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	35
		Persentase pengisian SIRUP yang diumumkan pada Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	100%
		IKPA pada Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	87
		Nilai kinerja anggaran pada Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	90

Indeks kepuasan masyarakat pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	90
Rata-rata nilai hasil pengawasan kearsipan pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	70
Persentase unit kerja yang memenuhi penyediaan data kepemudaan lingkup Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	100%
Tingkat harmonisasi dan penelaahan produk hukum pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	100%
Persentase serapan anggaran pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	99%
Persentase capaian output pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	95%
Persentase BMN yang dilaporkan pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	100%
Persentase pegawai ASN yang diberikan pengembangan kompetensi pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	50%
Nilai PM SAKIP pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	70
Persentase pengisian SIRUP yang diumumkan pasda Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	100%

	Nilai hasil pengawasan kearsipan internal pada Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	65
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	90
	Persentase temuan LHP BPK yang ditindak lanjuti pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	70%

D. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja digunakan untuk mengukur keberhasilan Indikator Kinerja dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada PK yang juga dicapai oleh kegiatan pendukung yang dilakukan oleh unit Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda. Adapun pemetaan kegiatan yang disesuaikan dengan target kinerja dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Pemetaan Target Kinerja dengan Kegiatan Pendukung pada Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja
(1)	(2)	(3)	(5)
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan organisasi pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda yang berkinerja, bersih, akuntabel, dan profesional	Persentase pengisian SIRUP yang diumumkan pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Data yang digunakan untuk penilaian adalah data tahun anggaran berjalan yang ditarik setiap 1 April. Nilai RUP menggunakan data tarikan dari https://www.sirup.lkpp.go.id dimulai tahun 2021 hingga 2024 dengan formulasi: Nilai dikalikan dengan bobot.
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Nilai IKPA pada aplikasi Oms.pan diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai kinerja indikator dikalikan dengan bobot masing-masing indikator pada tingkat K/L $\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot}^*)$
		Nilai Kinerja Anggaran pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	$\text{NKI} = (P \times W_p) + (K \times W_k) + (\text{CRO} \times W_{\text{cro}}) + (\text{NE} \times W_e)$ NKI = Nilai Kinerja Anggaran aspek Implementasi P = penyerapan anggaran

	K = Konsistensi RPD CRO = Capaian Realisasi Output NE = Nilai Efisiensi Wp = Bobot penyerapan anggaran = 9,7% Wk = Bobot konsistensi RPD = 18,2% Wck = Bobot Capaian Keluan = 43,5% We = Bobot efisiensi = 28,6%
Indeks kepuasan masyarakat pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Nilai Survey Kepuasan Layanan = $\sum x_i$
Rata-rata nilai hasil pengawasan kearsipan pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Pengawasan kearsipan internal dengan metode pengawasan audit kearsipan
Persentase unit kerja yang memenuhi penyediaan data kepemudaan lingkup Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Unit kerja yang memenuhi kebutuhan data sesuai dengan klasifikasi : Unit kerja keseluruhan x 100%
Tingkat harmonisasi dan penelaahan produk hukum pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Nilai bobot area perubahan deregulasi kebijakan pada aspek pemenuhan + Nilai bobot area perubahan deregulasi kebijakan (pada aspek reform) : 2

Persentase serapan anggaran pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran tiap triwulan, yaitu rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran pada setiap triwulan
Persentase capaian output pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja: 1. Komponen Ketepatan Waktu (30%) dihitung berdasarkan jumlah poin yang diperoleh dari ketepatan waktu penyampaian data capaian output paling lambat 5 hari kerja pada bulan berikutnya, yaitu poin 100 untuk RO yang dilaporkan tepat waktu dan poin 0 untuk RO yang dilaporkan terlambat 2. Komponen Capaian RO (70%) dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO. Untuk capaian RO melebihi target diberikan poin 100. RO yang dihitung adalah RO dengan status Terkonfirmasi

		Persentase BMN yang dilaporkan pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Jumlah laporan BMN yang disusun dan dilaporkan dibandingkan dengan keseluruhan laporan yang disusun selama 1 tahun dikali 100%
		Persentase Pegawai ASN yang diberikan pengembangan kompetensi pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja: Komponen Ketepatan Waktu (30%) dihitung berdasarkan jumlah poin yang diperoleh dari ketepatan waktu penyampaian data capaian output paling lambat 5 hari kerja pada bulan berikutnya, yaitu poin 100 untuk RO yang dilaporkan tepat waktu dan poin 0 untuk RO yang dilaporkan terlambat Komponen Capaian RO (70%) dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO. Untuk capaian RO melebihi target diberikan poin 100. RO yang dihitung adalah RO dengan status Terkonfirmasi
		Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (PM SAKIP) Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Adapun komponen SAKIP terdiri dari perencanaan kinerja dengan bobot penilaian 30%, pengukuran kinerja 25%, pelaporan kinerja 15%, evaluasi 10%. Kemudian, kinerja diukur dari capaian kinerja dengan bobot 20%.

		Persentase pengisian SIRUP yang diumumkan pada Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	Data yang digunakan untuk penilaian adalah data tahun anggaran berjalan yang ditarik setiap 1 April. Nilai RUP menggunakan data tarikan dari https://www.sirup.lkpp.go.id dimulai tahun 2021 hingga 2024 dengan formulasi: Nilai dikalikan dengan bobot.
		Nilai hasil pengawasan kearsipan pada Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	FORMULA Pengawasan kearsipan internal dengan metode pengawasan audit kearsipan
		Indeks Kepuasan Masyarakat pada Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	Berdasarkan data Real Time per 31 Desember 2023 pada aplikasi eSKM pada Sesdep
		Persentase temuan LHP BPK yang ditindak lanjuti pada Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	Pengukuran indikator ini merujuk pada total temuan yang ada pada masing-masing Satuan Kerja yang akan disampaikan oleh Inspektorat melalui nota dinas kepada Deputy dengan rumus penghitungan sebagai berikut: Rekomendasi yang dituntaskan dari hasil audit BPK/APIP Jumlah seluruh temuan dari tahun 2018

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai salah satu elemen terpenting dalam penerapan Laporan Kinerja, tahapan pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja keberhasilan (IKU), pengumpulan data kinerja, penilaian capaian kinerja, dilanjutkan dengan analisis capaian kinerja sebagai dasar untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan.

Nilai Capaian Kerja dihitung dengan membandingkan target IKU yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi sesuai dengan formula yang terdapat pada Manual IKU. Dilanjutkan pada tahapan analisis capaian kinerja, tahapan ini melibatkan pengolahan data yang telah dikumpulkan dan penilaian kinerja unit berdasarkan standar kinerja yang telah ditetapkan.

Evaluasi sangat penting dilakukan khususnya analisis yang menyangkut keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran; evaluasi sungguh-sungguh terhadap kegiatan tahun yang lalu dengan sasaran yang ingin dicapai; penentuan indikator kinerja; dan kegiatan inti organisasi. Untuk mengukur capaian kinerja sasaran digunakan indikator kinerja *outcome* dan indikator kinerja *output*, yang merupakan gambaran dari ukuran keberhasilan dari pelaksanaan program/kegiatan.

Pengukuran Kriteria Ketercapaian Target Indikator:

Tabel 5. Kategori Capaian Kinerja

Rentang Capaian	Kategori Capaian	Keterangan
Capaian ≥ 100	Sangat Baik	Capaian diperoleh dari persentase capaian hasil pengukuran setiap indikator kinerja
$90 < \text{Capaian} \leq 100$	Baik	
$80 < \text{Capaian} \leq 90$	Cukup	
Capaian ≤ 80	Kurang	

Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formulir Pengukuran Kinerja), perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi: Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Rencana Kinerja}} \times 100\%$$

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana Kinerja} - (\text{Capaian Kinerja} - \text{Rencana Kinerja})}{\text{Rencana Kinerja}} \times 100\%$$

Dalam bagian ini akan dijelaskan perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja yang selama tahun 2023 ini dilaksanakan beberapa tahapan kegiatan. Adapun penjelasan mengenai capaian dari target kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja
Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda tahun 2023**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kategori Capaian
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya manajemen organisasi yang berkualitas, keuangan yang efektif dan efisien serta pelayanan publik yang prima di lingkungan Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	Persentase pengisian SIRUP yang diumumkan pada Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	100%	93,22%	93,02 %	Baik
		IKPA pada Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	87	72.67	83.2%	Cukup
		Nilai kinerja anggaran pada Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	90	87.07	96.7%	Baik
		Indeks kepuasan masyarakat pada Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	90	79.49	90.3%	Baik
		Rata-rata nilai hasil pengawasan kearsipan pada Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	70	82,08	117%	Sangat Baik
		Persentase unit kerja yang memenuhi penyediaan data kepemudaan lingkup Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	100%	100%	100%	Sangat Baik

Pemuda				
Tingkat harmonisasi dan penelaahan produk hukum pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	100%	100%	100%	Sangat Baik
Persentase serapan anggaran pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	99%	97.71%	98.7%	Baik
Persentase capaian output pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	95%	100%	105%	Sangat Baik
Persentase BMN yang dilaporkan pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	100%	100%	100%	Sangat Baik
Persentase pegawai ASN yang diberikan pengembangan kompetensi pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	50%	91.3%	182%	Sangat Baik
Nilai PM SAKIP pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	70	78.18	111%	Sangat Baik
Persentase pengisian SIRUP yang diumumkan pada Sekretariat Deputi Bidang	100%	98.21%	98.2%	Baik

	Pengembangan Pemuda				
	Nilai hasil pengawasan kearsipan internal pada Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	65	89.69	138%	Sangat Baik
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	90	81	90%	Baik
	Persentase temuan LHP BPK yang ditindak lanjuti pada Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	70%	100%	142%	Sangat Baik

Berikut ini adalah target capaian kinerja dan realisasi capaian kinerja tahun 2022
Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda :

**Tabel 7. Target Capaian Kinerja Sekretariat
Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2022**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi	%	Kategori Capaian
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen di lingkungan Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Layanan Manajemen Satker Bidang Pengembangan Pemuda	80	82.08	102,6%	Sangat Baik
2	Meningkatnya kualitas layanan tata kelola, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi dan percepatan pelayanan publik	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi di lingkungan Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	131 orang	134 orang	102,2%	Sangat Baik
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	70	67,68	96.6%	Baik
		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	14,0	35,69	254,9%	Sangat Baik
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan	82.5	78,37	94,99%	Baik

		Anggaran (IKPA)				
		Nilai Indeks Pelayanan Publik	3.6	3,53	98,06%	Baik

Untuk memudahkan pengukuran kinerja sebagaimana diuraikan diatas digunakan formular Pengukuran Kinerja sebagaimana terdapat dalam lampiran laporan ini. Capaian kinerja sesuai sasaran strategis dan target setiap Indikator Kinerja Utama pada tahun 2023, secara ringkas adalah sebagai berikut:

B. EVALUASI DAN CAPAIAN ANALISIS KINERJA

Evaluasi sangat penting dilakukan khususnya analisis yang menyangkut keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran kegiatan; evaluasi sungguh-sungguh terhadap kegiatan tahun lalu dengan sasaran yang ingin dicapai penentuan indikator kinerja; dan kegiatan inti organisasi. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi, dan capaiannya pada tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

a. Sasaran Kegiatan 1, Indikator Kinerja 1

Tabel 8. Target Capaian Kinerja Persentase pengisian SIRUP Deputy Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan organisasi pada Deputy Bidang Pengembangan Pemuda yang berkinerja, bersih, akuntabel dan profesional.	Persentase pengisian SIRUP yang diumumkan pada Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	100%	93,22

SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUPnya sedangkan RUP adalah kegiatan yang terdiri dari identifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran sampai dengan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Pelaksanaan anggaran TA 2023 Satker Pengembangan Pemuda memperoleh

persentase SiRUP sebesar 93,22. Berdasarkan capaian tersebut, penilaian kinerja belum mencapai target secara maksimal dimana target maksimal tersebut bernilai 100%. Walaupun begitu jika dibandingkan dengan persentase SiRUP tahun 2022 Deputi Bidang Pengembangan Pemuda mengalami peningkatan yang sangat baik yaitu sebesar 19,72% dari realisasi senilai 73,49% di tahun 2022 menjadi 93,22% di tahun 2023. Berikut table perbandingan nilai persentase SiRUP:

Tabel 9. Perbandingan Nilai Presentase SiRUP

Perbandingan Persentase SiRUP Deputi Bidang Pengembangan Pemuda		
2021	2022	2023
77,67%	73,49%	93,22%

b. Sasaran Kegiatan 1, indikator Kinerja 2

Tabel 10. Target Capaian Kinerja Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan organisasi pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda yang berkinerja, bersih, akuntabel dan profesional.	IKPA pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	87	72.67

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022, IKPA adalah Indikator yang ditetapkan Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) sebagai alat ukur untuk menentukan kualitas tingkat kinerja dari sisi kesesuaian perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi. Untuk menghitung nilai IKPA, diperhitungkan 13 indikator yang didasarkan pada beberapa aspek berikut:

1. Aspek kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, terdiri dari indikator: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA dan Pagu Minus.
2. Aspek kepatuhan atas regulasi, terdiri dari indikator: Penyampaian Data Kontrak, Pengelolaan UP, Pengelolaan TUP, penyampaian LPJ Bendahara dan Dispensasi SPM.
3. Aspek efektivitas pelaksanaan kegiatan, terdiri dari indikator: retur SP2D, realisasi anggaran (non belanja pegawai) dan penyelesaian tagihan.

4. Aspek efisiensi pelaksanaan kegiatan, terdiri dari indikator: deviasi RPD dan penolakan SPM.

Pelaksanaan anggaran TA 2023 Satker Pengembangan Pemuda memperoleh nilai IKPA sebesar 72.42. Berdasarkan capaian tersebut, penilaian kinerja belum mencapai target secara maksimal senilai 87. Jika dibandingkan dengan nilai IKPA 2022 Deputy Pengembangan Pemuda mengalami penurunan nilai IKPA sebesar 5.7. Berikut perbandingan nilai IKPA Deputy Pengembangan Pemuda dari tahun 2021, 2022, 2023:

Tabel 11. Perbandingan Nilai IKPA

Perbandingan Nilai IKPA Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	
2023	72,67
2022	78,37
2021	79,96

Penurunan pencapaian nilai IKPA dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya:

1. Rendahnya rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan sehingga nilai Deviasi Halaman III DIPA sangat rendah.
2. Ketidaktepatan waktu penyampaian tagihan SPM LS Kontraktual.
3. Kurangnya akurasi antara rencana penarikan dana dengan realisasi pembayaran.
4. Instabilitas organisasi dimana terjadi perubahan komposisi pegawai dalam waktu yang berdekatan sehingga mengakibatkan perlunya waktu tambahan untuk menyesuaikan dan menyelesaikan pekerjaan.

Alternatif solusi atas ketidakcapaian IKU ini adalah Deputy Bidang Pengembangan Pemuda melalui Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda akan terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pengawasan pengelolaan kinerja keuangan yang berhubungan erat dengan ketaatan terhadap peraturan pengelolaan keuangan, kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta aktivitas pengelolaan uang.

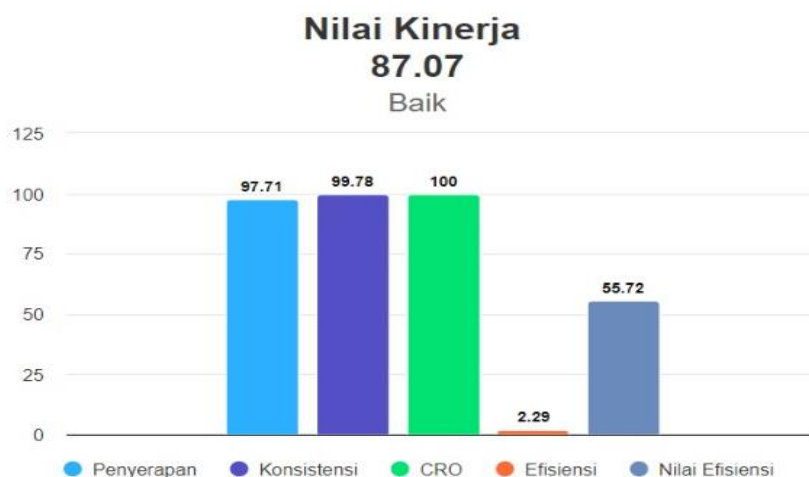
c. Sasaran Kegiatan 1, Indikator Kinerja 3

Tabel 12. Target Capaian Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2023

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan organisasi pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda yang berkinerja, bersih, akuntabel dan profesional.	Nilai kinerja anggaran pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	90	87.07

Nilai kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukan setiap Satuan Kerja Lingkup Deputi Bidang Pengembangan Pemuda ke dalam aplikasi SMART Kementerian Keuangan.

Berdasarkan pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2023 Satker Bidang Pengembangan Pemuda memperoleh nilai kinerja anggaran berdasarkan nilai SMART sebesar sebesar 87.07 dari target nilai 90 yang ditetapkan didalam PK Sekretariat Deputi bidang Pengembangan Pemuda. Berikut ialah rincian penilaian dari aplikasi ESMART



Gambar 2. Rincian Penilaian dari Aplikasi ESMART

Jika dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya nilai kinerja Deputy Bidang Pengembangan Pemuda mengalami penurunan nilai sebanyak 1,42. Untuk itu monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan diseluruh satuan kerja perlu terus dilakukan untuk merumuskan langkah langkah strategis peningkatan nilai SMART tahun 2023 serta upaya perbaikan utamanya pada indikator yang nilainya masih cukup rendah atau belum optimal dengan meningkatkan sinergitas antara pelaksana kegiatan dengan pengelola keuangan serta lebih mematuhi regulasi-regulasi terkait pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Berikut table perbandingan nilai kinerja tahun 2021, 2022, 2023:

Tabel 13. Tabel Perbandingan Nilai Kinerja Tahun 2021, 2022, dan 2023

Perbandingan Nilai Kinerja Deputy Bidang Pengembangan Pemuda		
2021	2022	2023
75,29	88,49	87,07

d. Sasaran Kegiatan 1, Indikator Kinerja 4

Tabel 14. Target Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan organisasi pada Deputy Bidang Pengembangan Pemuda yang berkinerja, bersih, akuntabel dan profesional.	Indeks kepuasan masyarakat pada Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	90	79.49

Dengan semakin berkembangnya zaman, peran media masa semakin besar dalam menyebarkan berbagai informasi. Berbagai macam media sudah tersedia baik yang gratis maupun yang berbayar. Dengan memanfaatkan peran media massa secara optimal maka suatu organisasi bisa lebih dikenal dan eksis ditengah masyarakat. Melalui media massa juga diharapkan hubungan antara organisasi dengan masyarakat akan lebih erat terjalin. Bentuk pemberitaan dan publikasi yang dilakukan Deputy Bidang Pengembangan Pemuda merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat bahwa kegiatan-kegiatan yang direncanakan telah terlaksana dengan baik.

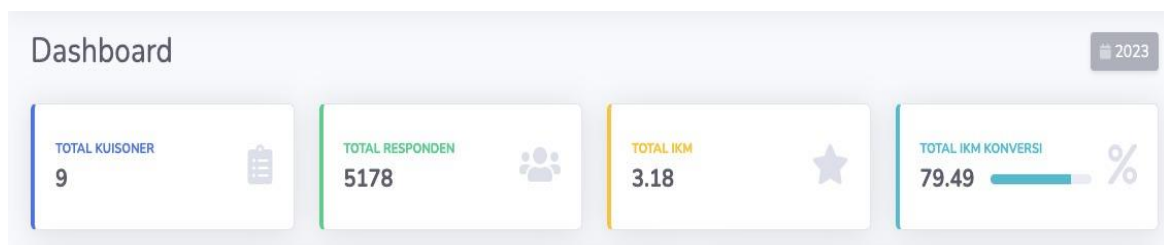
Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Deputy Bidang

Pengembangan Pemuda diantaranya:

Tabel 15. Kegiatan Deputy Bidang Pengembangan Pemuda

No	Kegiatan
1	Hari Sumpah Pemuda
2	Pemuda Pelopor
3	Pelatihan Kepemimpinan Pemuda Nasional (PKPMN)
4	Pertukaran Pemuda Indonesia – Australia (PPIA)
5	Collab Rangers
6	Pendidikan Kepemimpinan Pemuda Dalam Rumah Tangga (PKPRT)
7	Kuliah Kewirausahaan Pemuda
8	Rapat Koordinasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan
9	Pesantrenpreneur
10	Asean Youth Interfaith Camp (AYIC)
11	Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP)
12	Pertukaran Pemuda Indonesia-Korea (PPIKOR)

Salah satu indikator kinerja yang ada pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda yakni Nilai Survei Kepuasan Masyarakat pada Deputy Bidang Pengembangan Pemuda.



Gambar 3. Survei Kepuasan Pelayanan

Survei kepuasan terdiri dari survei dari unit kesekretariatan dan asisten deputy yang nantinya akan ditotal untuk memperoleh nilai survei kepuasan masyarakat dari Deputy Bidang Pengembangan Pemuda. Setelah dilakukan penghitungan didapatkan hasil penilaian 79,49 dari 90 yang diambil dari nilai IKM. Berikut Jumlah dan persentase responden dari tiap unit di Deputy Bidang Pengembangan Pemuda.

3	Deputi Bidang Pengembangan Pemuda		
-	Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	69	1.33%
-	Asisten Deputi Kepemimpinan Pemuda	376	7.26%
-	Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda	4635	89.51%
-	Asisten Deputi Kepeloporan Pemuda	55	1.06%
-	Asisten Deputi Kemitraan Pemuda	43	0.83%

Gambar 4. Jumlah dan Persentase Reponden dari Tiap Unit di Deputi Bidang Pengembangan Pemuda

Jika dilakukan perbandingan dengan nilai hasil survey kepuasan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda tahun 2022 terdapat gap nilai yang cukup besar dimana terjadi penurunan nilai dari survey IKM 2022 yaitu 88,4 menjadi 79,49 di tahun 2023. Penurunan nilai IKM sebanyak 8,09 dikarenakan terjadi duplikasi data responden sehingga mengakibatkan bias pada nilai hasil konversi indeks kepuasan masyarakat. Solusi alternatif yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya duplikasi data tersebut adalah dengan meningkatkan pemantauan data subjek atau responden survey kepuasan masyarakat dan memastikan bahwa data diisi hanya satu kali per subjek atau responden melalui one time password bagi responden yang menerima pelayanan dari Deputi Bidang Pengembangan Pemuda dan melakukan pengisian pada portal e-SKM Kemenpora.

Tabel 16. Perbandingan Nilai E-SKM Deputi Bidang Pengembangan Pemuda

Perbandingan Nilai E-SKM Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	
2023	79,49
2022	88,4
2021	91,78

e. Sasaran Kegiatan 1, Indikator Kinerja 5

Tabel 17. Target Capaian Kinerja Rata-rata nilai hasil pengawasan kearsipan tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan organisasi pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda yang berkinerja, bersih, akuntabel dan profesional.	Rata-rata nilai hasil pengawasan kearsipan pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	70	82,08

Rekapitulasi surat masuk dan surat keluar pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda tahun 2023 diantaranya sebagai berikut:

Tabel 18. Rekapitulasi Surat Masuk dan Surat Keluar Tahun 2023

No	Keterangan	Jumlah
1	Surat Masuk	525
2	Proposal	163

Jika dilakukan perbandingan dengan nilai pengawasan kearsipan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda tahun 2022 dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan yang signifikan terhadap nilai dari pengawasan kearsipan 2022 yaitu 68,35 menjadi 82,08 di tahun 2023. Peningkatan nilai pengawasan kearsipan sebanyak 13,73 dikarenakan adanya perubahan system persuratan dan kearsipan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Berdasarkan Surat Edaran No. TI.01/9.29.1/SET/IX/2022 Tentang Pedoman Teknis Penerapan Srikandi Di Lingkungan Kementerian Pemuda Dan Olahraga, bahwa seluruh pegawai diharapkan mulai menerapkan penggunaan aplikasi SRIKANDI secara full demi mewujudkan tata kelola kearsipan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya berbasis elektronik. Berikut table perbandingan nilai pengawasan kearsipan pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda dari tahun 2021, 2022, dan 2023:

**Tabel 19. Perbandingan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan
Deputi Bidang Pengembangan Pemuda**

Perbandingan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	
2023	82,08
2022	68,35
2021	63,06

f. Sasaran Kegiatan 1, Indikator Kinerja 6

**Tabel 20. Target Capaian Kinerja
Persentase unit kerja yang memenuhi penyediaan data kepemudaan tahun 2023**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan organisasi pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda yang berkinerja, bersih, akuntabel dan profesional.	Persentase unit kerja yang memenuhi penyediaan data kepemudaan lingkup Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	100%	100%

Data menjadi hal yang sangat penting di era digital seperti sekarang ini. Melalui data kita bisa memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam hal ini Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda bertugas dalam mengkoordinasi data dari tiap Asisten Deputi untuk memenuhi penyediaan data di lingkungan kedeputian. Rekap data kepemudaan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda seperti data IPP dan data kewirausahaan pemuda yang merupakan data prioritas dari Deputi Bidang Pengembangan Pemuda dapat diakses di <https://satudata.kemempora.go.id/id/> sebagai sarana pelayanan data terpadu Kementerian Pemuda dan Olahraga. Data-data hasil kegiatan keasdepan antara lain:

Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda	Asisten Deputi Kepeloporan Pemuda
Data Pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan	Data Lembaga/Komunitas Kepemudaan yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda
Data Wirausaha Muda Berprestasi	Data Pemuda Kader yang terfasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda
Data fasilitasi Lembaga pengembangan kewirausahaan	Data Pemuda Kader Berprestasi Penerima Penghargaan Kepeloporan Pemuda
Asisten Deputi Kepimimpinan Pemuda	Asisten Deputi Kemitraan Pemuda
Data Lembaga / Komunitas kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan kepemimpinan pemuda	Data pemuda kader yang terfasilitasi dalam kegiatan kepemudaan nasional dan internasional
Data pemuda kader yang terfasilitasi dalam Youth Leadership Summit	Data provinsi yang melakukan penyusunan RAD kepemudaan
Data pemuda kader berprestasi penerima penghargaan bidang kepemimpinan	Data Kementerian/Lembaga yang terlibat aktif dalam pencapaian target RAN pelayanan kepemudaan

Gambar 5. Data-data Hasil Kegiatan Keasdepan

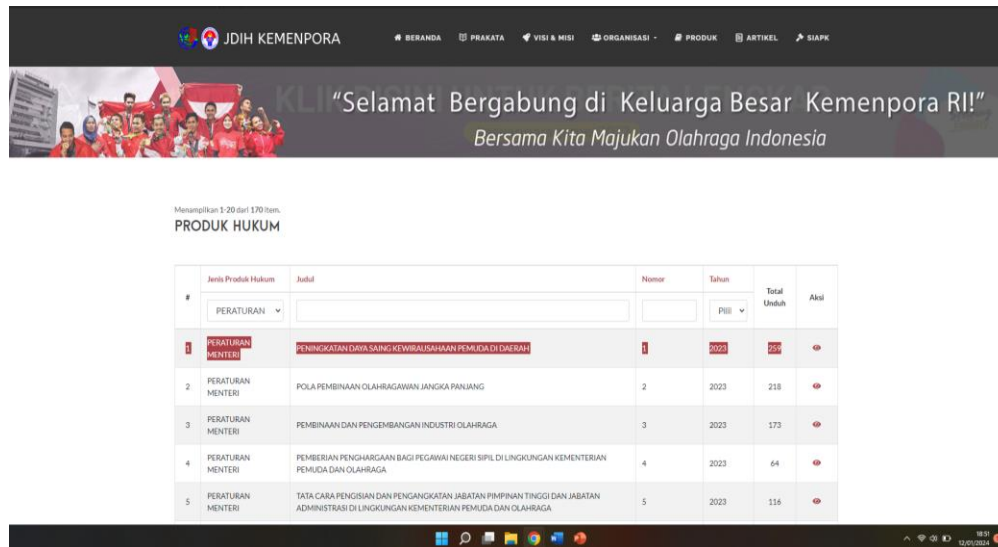
g. Sasaran Kegiatan 1, Indikator Kinerja 7

Tabel 21. Target Capaian Kinerja Tingkat harmonisasi dan penelaahan produk hukum tahun 2023

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan organisasi pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda yang berkinerja, bersih, akuntabel dan profesional.	Tingkat harmonisasi dan penelaahan produk hukum pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	100%	100%

Untuk mendukung Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, Kementerian Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga telah mengeluarkan sejumlah Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan. Peraturan tersebut semuanya tersedia secara online di www.jdih.kemempora.go.id. Selain itu, Deputi Pengembangan Pemuda telah menetapkan sejumlah peraturan di lingkungan Deputi Pengembangan Pemuda sesuai

dengan tanggung jawab dan fungsinya yang dituangkan dalam Peraturan Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian. Pemuda dan Olahraga.



Menampilkan 1-20 dari 170 item

PRODUK HUKUM

#	Jenis Produk Hukum	Judul	Nomor	Tahun	Total Unduh	Aksi
1	PERATURAN MENTERI	PENINGKATAN DAYA SAING KEWIBALSAHAAN PEMUDA DI DAERAH	1	2023	25	
2	PERATURAN MENTERI	POLA PEMBINAAN OLARAGAWAN JANGKA PANJANG	2	2023	218	
3	PERATURAN MENTERI	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI OLARAGA	3	2023	173	
4	PERATURAN MENTERI	PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLARAGA	4	2023	64	
5	PERATURAN MENTERI	TATA CARA PENGISIAN DAN PENGANGKATAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN JABATAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLARAGA	5	2023	116	

Gambar 6. Gambar 2. Contoh Produk Hukum dalam www.jdih.kemenpora.go.id

Tabel 22. Produk Hukum tahun 2023

NO.	PRODUK HUKUM	KETERANGAN
1.	Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peningkatan Daya Saing Kewirausahaan Pemuda di Daerah	Ditetapkan dan diundangkan
2.	Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Nomor 1.20.1 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Wirausaha Muda Pemula, Sociopreneur dan Sentra Kewirausahaan Pemuda	ttd.
3.	Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Nomor 1.20.2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Untuk Kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda di Pesantren/Pesantrenpreneur	ttd.
4.	Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Nomor 1.20.3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Apresiasi Wirausaha Muda Pemula Berprestasi dan Penggerak Wirausaha Muda Pemula Berprestasi Tingkat Nasional	ttd.
5.	Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Nomor 1.20.4 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Untuk Fasilitas Kegiatan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda	ttd.
6.	Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Nomor 1.20.5 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Untuk Fasilitas Kegiatan Pengembangan Kepedulian, Kesukarelawanan, Dan Kepeloporan Pemuda	ttd.
7.	Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Nomor 1.20.6 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Untuk Bantuan Kegiatan Event-Event Kepemudaan Tingkat Internasional di Dalam Negeri dan Luar Negeri	ttd.
8.	Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Nomor 1.20.7 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi	ttd.
9.	Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Nomor 1.20.8 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi	ttd.

h. Sasaran Kegiatan 1, Indikator Kinerja 8

Tabel 23. Target Capaian Kinerja Persentase Serapan Anggaran tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan organisasi pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda yang berkinerja, bersih, akuntabel dan profesional.	Persentase serapan anggaran pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	99%	97.71%

Penyerapan anggaran berhubungan dengan kinerja anggaran dan merupakan kemampuan Kementerian/Lembaga dalam menggunakan sumber daya keuangan yang ada. Penyerapan anggaran berhubungan dengan penyediaan, pembagian, dan kewajiban yang bersifat dinamis dari sumber daya keuangan. Persentase serapan anggaran Deputi Bidang Pengembangan Pemuda per Desember 2023 adalah sebesar 97,71% dengan rincian sebagai berikut:

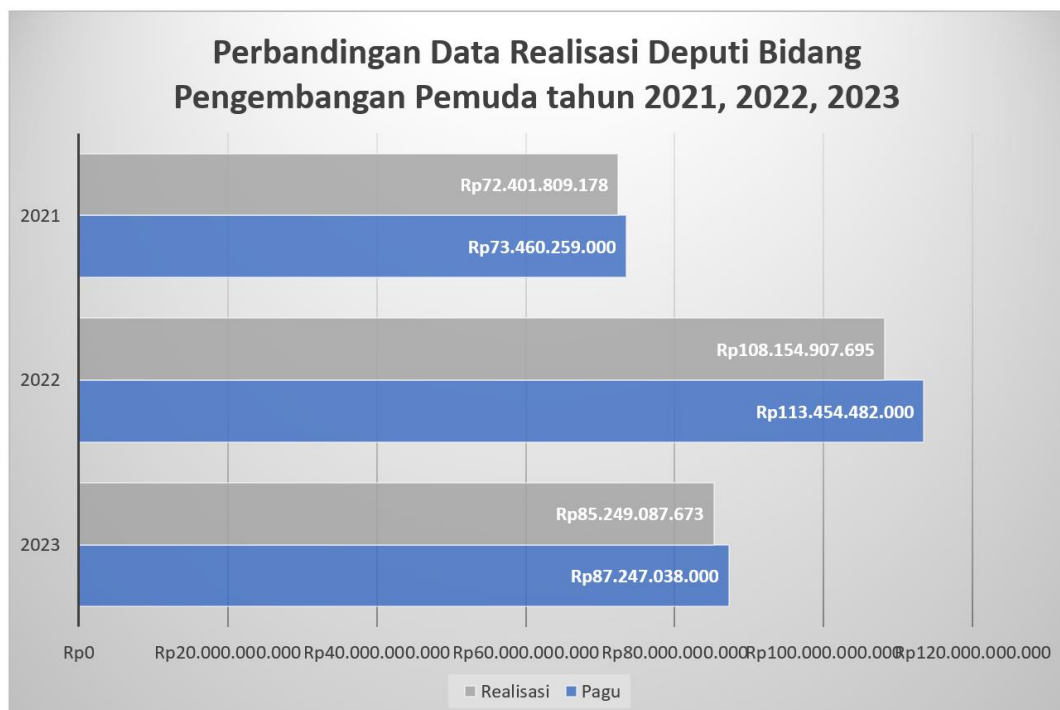
Tabel 24. Persentase Serapan Anggaran Deputi Bidang Pengembangan Pemuda per Desember 2023

Unit	Anggaran	Realisasi	Persentase Penyerapan
Sekretariat Deputi	5.000.000.000	4,771,138,578	95.42%
Asdep Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	1,944,830,000	1,916,133,865	98.52%
Asdep Kepemimpinan Pemuda	18,041,755,000	17,874,688,675	99.07%
Asdep Kepeloporan Pemuda	15,771,915,000	15,708,889,090	99.60%
Asdep Kewirausahaan Pemuda	30.572.250.000	29.540.365.632	96.62%
Asdep Kemitraan dan Penghargaan Pemuda	1,049,623,000	1,016,740,656	96.87%
Asdep Kemitraan Pemuda	14,866,665,000	14,421,131,177	97.00%
TOTAL	87.247.038.000	85,249,087,673	97.71%

Banyak hal yang mempengaruhi penyerapan anggaran Deputy Bidang Pengembangan Pemuda masih belum mencapai target diantaranya:

1. Pada awal tahun anggaran 2023 terdapat kendala proses pencairan anggaran yang disebabkan oleh adanya blokir anggaran oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan sehingga harus melakukan pengajuan pembukaan blokir tersebut
2. Adanya revisi anggaran pada tengah tahun anggaran yang menyebabkan terhambatnya proses pencairan karena menunggu proses revisi selesai
3. Menumpuknya kegiatan di akhir tahun yang menyebabkan pengelolaan keuangan menjadi tidak maksimal.

Pagu Deputy Bidang Pengembangan Pemuda tahun 2021 s.d 2023 cenderung berfluktuasi secara jumlah pagu dan realisasi yang dicapai. Jika dibandingkan pada tahun 2021, Deputy Bidang Pengembangan Pemuda mencapai persentase realisasi tertinggi selama 3 tahun berturut-turut, yaitu sebesar 98,55% dari total pagu anggaran yang telah ditetapkan. Walaupun belum mencapai target persentase penyerapan anggaran tahun 2023 cenderung meningkat dibandingkan dengan persentase penyerapan di tahun 2022. Berikut table perbandingan data realisasi anggaran Deputy Bidang Pengembangan Pemuda tahun 2021, 2022, dan 2023:



Gambar 7. perbandingan Data Realisasi Anggaran Deputy Bidang Pengembangan Pemuda tahun 2021, 2022, dan 2023

i. Sasaran Kegiatan 1, Indikator Kinerja 9

Tabel 25. Target Capaian Kinerja Persentase Capaian Output tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan organisasi pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda yang berkinerja, bersih, akuntabel dan profesional.	Persentase capaian output pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	95%	100%

Capaian Output merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur ketepatan waktu penyampaian data dan ketercapaian output pada K/L/unit Eselon I/Satker. Nilai IKPA Capaian Output dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja Komponen Ketepatan Waktu (30%), dan Komponen Capaian RO (70%).

Nilai capaian output Deputi Bidang Pengembangan Pemuda 2023 adalah sebesar 100% dari nilai yang ditargetkan sebesar 95%. Berdasarkan data tahun 2022 Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda terbukti mampu menjaga kinerjanya dengan kembali melampaui target persentasi capaian output dengan realisasi 100% pada indikator ini.

j. Sasaran Kegiatan 1, Indikator Kinerja 10

Tabel 26. Target Capaian Kinerja Persentase BMN yang dilaporkan tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan organisasi pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda yang berkinerja, bersih, akuntabel dan profesional.	Persentase BMN yang dilaporkan pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	100%	100%

Barang Milik Negara yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lain yang sah. Dalam rangka pemanfaatan dan pertanggungjawaban penggunaan barang milik negara instansi pemerintah termasuk Kementerian Pemuda dan Olahraga, khususnya pada satker Pengembangan Pemuda diwajibkan untuk menyusun Laporan Barang Milik Negara per semester yang didalamnya mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Deputi Bidang Pengembangan Pemuda. Nilai persentase BMN yang dilaporkan mencapai target 100% karena pelaporan BMN pada Satker Sekretariat Pengembangan Pemuda dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan jumlah laporan yang harus diselesaikan. Berdasarkan data tahun 2022 Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda terbukti mampu menjaga kinerjanya dengan kembali mempertahankan realisasi target 100% pada indikator ini.

j. Sasaran Kegiatan 1, Indikator Kinerja 11

Tabel 27. Target Capaian Kinerja Persentase pegawai ASN yang diberikan pengembangan kompetensi pada tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan organisasi pada Deputy Bidang Pengembangan Pemuda yang berkinerja, bersih, akuntabel dan profesional.	Persentase pegawai ASN yang diberikan pengembangan kompetensi pada Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	50%	91,3%

Guna mewujudkan ASN yang bebas dari campur tangan politik, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu memberikan pelayanan publik yang profesional dan bermutu, Deputy Bidang Pembangunan Pemuda melalui Sekretariat Deputy Pembangunan Pemuda, sedang melakukan reformasi ASN. Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi peran ASN sebagai elemen persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Pada tahun anggaran 2023 Deputy Bidang Pengembangan Pemuda berhasil melampaui target indikator dengan persentase realisasi sebesar 91,3% dengan kata lain pada tahun ini pengembangan pegawai yang dilakukan oleh Sekretariat Deputy II berhasil menyentuh 63 pegawai ASN dari 69 total pegawai. Berikut perbandingan target dan capaian tahun 2022 dan 2023.

Tabel 28. Perbandingan Target dan Capaian Tahun 2022 dan 2023

Perbandingan Persentase pegawai ASN yang diberikan pengembangan kompetensi pada Deputy Bidang Pengembangan Pemuda			
Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
131 orang	134 orang	50%	91,3%

Dalam satu tahun, Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda telah menjalankan kegiatan pengembangan SDM sebagai berikut:

Tabel 29. Kegiatan Pengembangan SDM

NO.	KEGIATAN	TANGGAL
1	Pelatihn PBJ	29 Mei-1Juni
2	Pelatihan Penyusunan Berita	4-6 Sepember
3	Pelatihan Penyusunan Presentasi dan Komunikasi	4-6 Sepember
4	BimtekKonten dan Media Sosial	4-5 Desember
5	BimtekPelaporan Keuangan dan Perpajakan	4-5 Desebaer
6	Sosialisasi Evaluasi Kinerja Pegawai	22 Juni
7	Sosialisasi Tata Naskah Dinasdan Kearsipan	15 Juni

k. Sasaran Kegiatan 1, Indikator Kinerja 12

Tabel 30. Target Capaian Kinerja Nilai PM SAKIP tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan organisasi pada Deputy Bidang Pengembangan Pemuda yang berkinerja, bersih, akuntabel dan profesional.	Nilai PM SAKIP pada Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	70	78,18

Setiap pimpinan instansi pemerintah diwajibkan untuk melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungannya setiap tahun sesuai yang tercantum dalam PermenPAN-RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja khususnya kinerja publik di instansi secara berkelanjutan. Evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif Instansi Pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran

kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE. Penyusunan laporan kinerja ada dua kegiatan yaitu LKj Sekretariat Deputy Pengembangan Pemuda dan LKj Deputy Bidang Pengembangan Pemuda yang disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Eselon 1 dan 2. Berdasarkan hasil penilaian evaluasi Laporan Kinerja Eselon I dan II di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2022 yang dilakukan Inspektorat didapatkan nilai 78,18.

HASIL EVALUASI SAKIP INTERNAL UKEI & II KEMENPORA

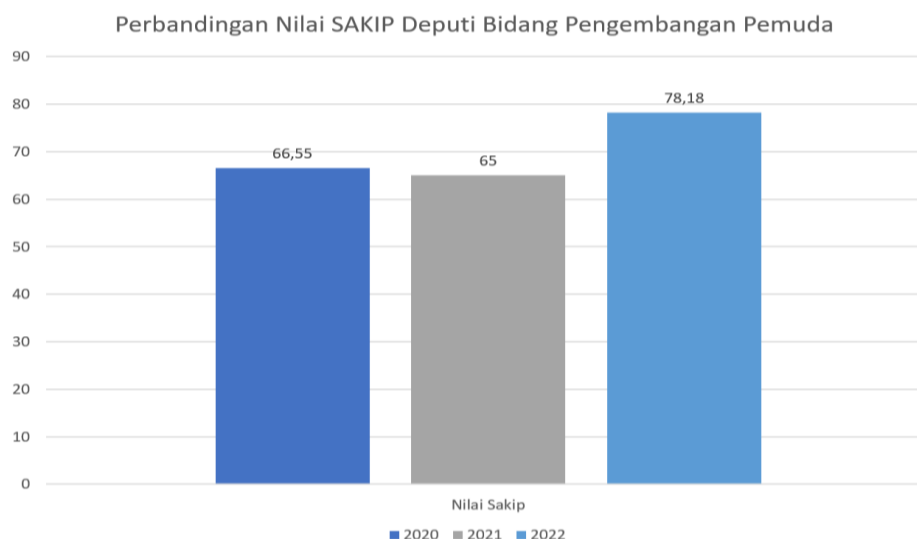


DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA

NO	ASPEK	BOBOT	DEPUTI II	SESDEP II	KKP	KWH	OKPK	SIP	KEMITRAAN	RATA-RATA
1	Perencanaan Kinerja	30	24,75	23,55	29,48	19,68	20,64	25,75	19,68	23,36
2	Pengukuran Kinerja	25	18,13	14,38	20,00	8,44	15,00	18,75	8,44	14,73
3	Pelaporan Kinerja	15	13,11	13,83	10,88	9,72	13,11	14,55	9,72	12,13
4	Evaluasi Kinerja	10	5,62	4,42	7,85	4,25	4,13	6,85	4,25	5,34
5	Pencapaian Kinerja	20	16,57	11,50	14,38	14,00	12,25	18,04	12,97	14,24
	TOTAL	100	78,18	67,68	82,59	56,09	65,13	83,94	55,06	69,80

Gambar 8. Hasil Evaluasi Sakip Internal

Jika dibandingkan dengan nilai evaluasi SAKIP tahun 2020 dan 2021 nilai evaluasi SAKIP yang diperoleh di tahun 2022 meningkat cukup baik. Walaupun belum mencapai target nilai evaluasi SAKIP Deputy Bidang Pengembangan Pemuda meningkat sebanyak 13,18 poin. Perbandingan nilai SAKIP dapat dilihat dari gambar berikut.



Gambar 9. Perbandingan Nilai SAKIP Deputy Bidang Pengembangan Pemuda

I. Sasaran Kegiatan 1, Indikator Kinerja 14

Tabel 31. Target Capaian Kinerja Persentase pengisian SIRUP Sekretariat Deputy tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan organisasi pada Deputy Bidang Pengembangan Pemuda yang berkinerja, bersih, akuntabel dan profesional.	Persentase pengisian SIRUP yang diumumkan pada Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	100%	98.21%

Aplikasi Sirup pada Sekretariat Deputy Pengembangan Pemuda ditujukan untuk melakukan penginputan dan memuat daftar RUP yang kemudian akan di aproval oleh akun SiRUP kedewputian. Nilai persentase pengisian SiRUP yang diumumkan pada Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda adalah sebesar 98.21% dari target sebesar 100%.

Walaupun belum sempurna mencapai target, jika dibandingkan dengan persentase SiRUP tahun 2022 Deputy Bidang Pengembangan Pemuda mengalami peningkatan yang sangat baik yaitu sebesar 40,67% dari realisasi senilai 57,54% di tahun 2022 menjadi 98,21% ditahun 2023. Berikut table perbandingan nilai persentase SiRUP:

Tabel 32. Tabel Perbandingan Nilai Presentase SiRUP

Perbandingan Persentase SiRUP Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda		
2021	2022	2023
9,25%	57,54%	98,21%

m. Sasaran Kegiatan 1, Indikator Kinerja 15

Tabel 33. Target Capaian Kinerja Nilai hasil pengawasan kearsipan internal Sekretariat tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan organisasi pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda yang berkinerja, bersih, akuntabel dan profesional.	Nilai hasil pengawasan kearsipan internal pada Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	65	89.69

Rekapitulasi surat masuk dan surat keluar pada Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda tahun 2023 diantaranya sebagai berikut:

Tabel 34. Rekapitulasi Surat Masuk dan Surat Keluar Tahun 2023

No	Keterangan	Jumlah
1	Surat Masuk	867
2	Surat Keluar	354

Setelah pemberlakuan Surat Edaran No. TI.01/9.29.1/SET/IX/2022 Tentang Pedoman Teknis Penerapan Srikandi Di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga terjadi peningkatan yang signifikan terhadap nilai dari pengawasan kearsipan Sekretariat Deputi Pengembangan Pemuda jika dilakukan perbandingan dengan nilai pengawasan di tahun 2021 dan 2022. Berikut table perbandingan nilai pengawasan kearsipan Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda:

Tabel 35. Tabel Perbandingan Nilai Pengawasan Kearsipan

Perbandingan Nilai Pengawasan Kearsipan Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	
2023	89,69
2022	67,93
2021	65,35

o. Sasaran Kegiatan 1, Indikator Kinerja 15

Tabel 36. Target Capaian Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan organisasi pada Deputy Bidang Pengembangan Pemuda yang berkinerja, bersih, akuntabel dan profesional.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	90	81

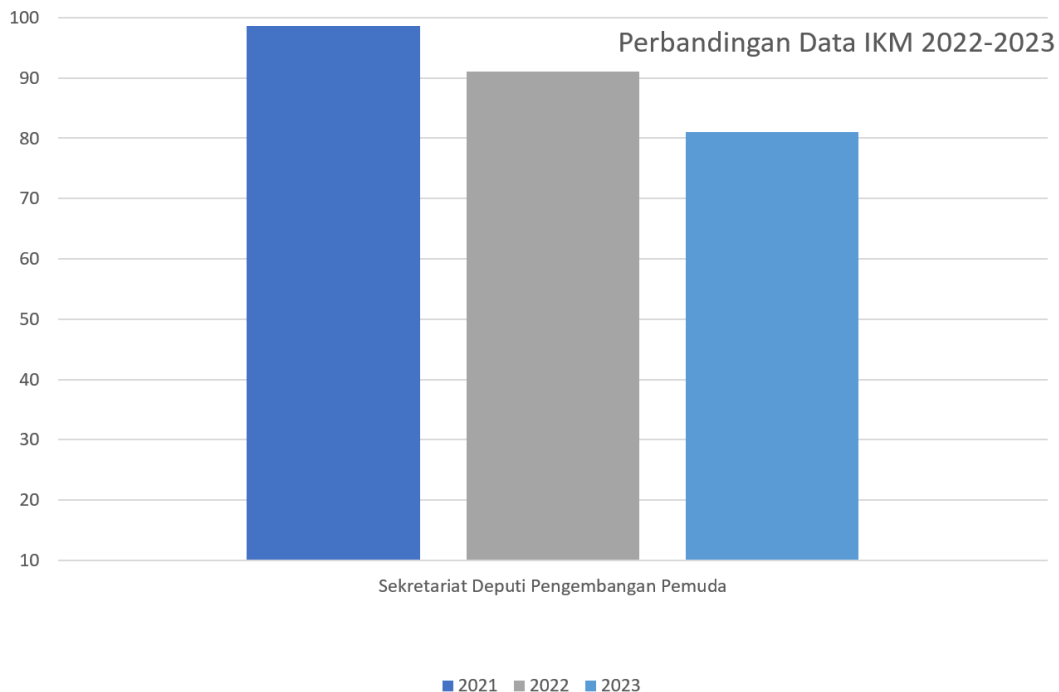
Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda memiliki kegiatan pelayanan hubungan masyarakat yang mempunyai fungsi pokok untuk membangun citra dan image pemerintah yang baik, produktif, dan humanis di mata masyarakat luas. Kehumasan bertugas untuk mendokumentasikan dan mempublikasikan kegiatan pemerintahan pada masyarakat luas agar masyarakat dapat mengetahui pelaksanaan kegiatan yang terjadi di pemerintah. Selain itu, humas juga berperan membangun image pemerintah yang bertanggung jawab dan melaksanakan program/kegiatan dengan baik. Contoh kegiatan dokumentasi dan publikasi dari tim Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda dapat di akses di <https://deputi2.kemenpora.go.id/>.



Gambar 10. Website Resmi Deputy Bidang Pengembangan Pemuda

Salah satu indikator kinerja yang ada pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Deputy Bidang

Pengembangan Pemuda yakni Nilai Survei Kepuasan Layanan Manajemen, berikut perbandingan data Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda tahun 2022 dan tahun 2023.



Gambar 11. Perbandingan Data IKM 2022-2023

Berdasarkan perbandingan diatas terdapat penurunan hasil survey dimana tahun 2022 nilai IKM Sekretariat Deputy sebesar 91.41 dan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 9.51 dengan total nilai 81.



Gambar 12. Niali E-SKM Sekretariat Deputy Pengembangan Pemuda

p. Sasaran Kegiatan 1, Indikator Kinerja 16

Tabel 37. Target Capaian Kinerja Persentase temuan LHP BPK yang ditindak lanjuti tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan organisasi pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda yang berkinerja, bersih, akuntabel dan profesional.	Persentase temuan LHP BPK yang ditindak lanjuti pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	70%	100%

Dokumen LHP merupakan hasil pemeriksaan laporan keuangan Lembaga pemerintahan yang dilakukan BPK. Hasil dari dokumen tersebut menyajikan tiga hal, yaitu opini audit, temuan audit, dan kesimpulan atau rekomendasi BPK RI. Dalam LHP BPK Deputi Bidang Pengembangan Pemuda terdapat temuan pemeriksaan berupa Pelaksanaan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tidak Sesuai Ketentuan senilai Rp247.256.700 yang kemudian menghasilkan dua rekomendasi kepada Menteri Pemuda dan Olahraga untuk menginstruksikan Deputi Pengembangan Pemuda agar:

1. Melakukan pengendalian yang memadai atas pelaksanaan pertanggungjawaban perjadi dalam negeri;
2. Memerintahkan PPK dan BPP di lingkungan kerjanya agar melakukan pengujian pertanggungjawaban belanja perjadi dan mempedomani ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan rekomendasi tersebut Deputi Bidang Pengembangan Pemuda melakukan tindak lanjut berupa penerapan Surat Edaran Nomor 6.26.17 Tahun 2023 Tentang Pertanggungjawaban Biaya Transportasi Darat Dalam Rangka Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Di Lingkungan Kementerian Pemuda Dan Olahraga Tahun Anggaran 2023. Dalam surat edaran tersebut disampaikan bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost), dengan batas paling tinggi sesuai ketentuan Satuan Biaya Masukan tahun 2023.

B. Kendala dan Solusi

5. Kendala yang dihadapi Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda yakni:

1. Pada awal tahun anggaran 2023 terdapat kendala proses pencairan anggaran yang disebabkan oleh adanya blokir anggaran oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu sehingga harus melakukan pengajuan pembukaan blokir tersebut
2. Adanya revisi anggaran pada tengah tahun anggaran yang menyebabkan terhambatnya proses pencairan karena menunggu proses revisi selesai
3. Menumpuknya kegiatan di akhir tahun yang menyebabkan pengelolaan keuangan menjadi tidak maksimal.

6. Solusi :

1. Memperhatikan kompetensi sumber daya manusia yang memahami pengelolaan program dan anggaran untuk memperlancar proses pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran
2. Perlu diselenggarakan pelatihan/workshop kompetensi SDM terutama yang diperlukan secara mendesak, seperti infografis dan lainnya.
3. Meningkatkan kualitas perencanaan pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan tidak menumpuk di akhir tahun.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda disusun berdasarkan Penetapan Kinerja dan DIPA Tahun Anggaran 2023, sebagai pelaksanaan kinerja intansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan organisasi. Laporan Kinerja Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan pemuda Tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran program Deputy Bidang Pengembangan Pemuda tahun 2023 dan perkembangan tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Program (IKP).

Laporan Kinerja Sekretariat Deputy Pengembangan Pemuda Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja pada berbagai perspektif, sasaran strategis dan indikator keberhasilannya. Laporan ini merupakan wujud tertib administrasi, komitmen, transparansi dan akuntabilitas Sekretariat Deputy Pengembangan Pemuda dalam melaksanakan kewajiban dan amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi pada unit kesesdepan.

Laporan Kinerja Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2023 telah menunjukkan capaian kinerja cukup baik. Hal ini tercermin dari sinkronisasi antara kegiatan yang dirancang dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan manajemen waktu yang telah ditetapkan. Meski begitu banyak faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya pencapaian kinerja yang dihasilkan. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Laporan Kinerja yang dirumuskan pada bagian saran ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan pelaksanaan program yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

B. Saran

Untuk lebih meningkatkan kinerja aparatur di lingkungan Sekretariat Deputi Pengembangan Pemuda, perlu ditempuh berbagai upaya strategis sebagai berikut :

1. Perencanaan yang lebih baik dan adanya kepastian;
2. Membangun komitmen bersama dalam mewujudkan revolusi mental.

Semoga Laporan Kinerja tahun 2023 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

LAMPIRAN – LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi pada *outcome*, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Subroto, Ak. M.M.,CA, CRGP, QIA. .

Jabatan : Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Pemuda

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Raden Isnanta, M.Pd.

Jabatan : Deputi Bidang Pengembangan Pemuda

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji

1. Akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini;
2. Akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya mencapai target kinerja;
3. Akan melaporkan pencapaian kinerja secara berkala kepada pihak kedua;
4. Akan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk pencapaian target kinerja;
5. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan siap menerima sanksi atas segala kegagalan yang terjadi.

Pihak kedua akan:

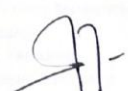
1. Akan melakukan evaluasi dan supervisi terhadap upaya-upaya yang dilakukan dan capaian kinerja yang dihasilkan dari perjanjian ini
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, November 2023

Pihak Kedua,


Dr. Raden Isnanta, M.Pd.

Pihak Pertama,


Subroto, Ak. M.M.,CA, CRGP, QIA.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIS DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA

NO (1)	SASARAN PROGRAM (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan organisasi pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda yang berkinerja, bersih, akuntabel, dan professional.	1.1 Persentase pengisian SIRUP yang diumumkan pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	100%
		1.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	87
		1.3 Nilai Kinerja Anggaran pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	90
		1.4 Indeks kepuasan masyarakat pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	90
		1.5 Rata-rata nilai hasil pengawasan kearsipan pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	70
		1.6 Persentase unit kerja yang memenuhi penyediaan data kepemudaan lingkup Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	100%
		1.7 Tingkat harmonisasi dan penelaahan produk hukum pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	100%
		1.8 Persentase serapan anggaran pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	90%
		1.9 Persentase capaian output pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	95%
		1.10 Persentase BMN yang dilaporkan pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	100%
		1.11 Persentase Pegawai ASN yang diberikan pengembangan kompetensi pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	50%

NO (1)	SASARAN PROGRAM (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
		1.12 Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (PM SAKIP) Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	68
		1.13 Persentase Pengisian SIRUP yang diumumkan pada Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	100%
		1.14 Nilai hasil pengawasan kearsipan internal pada Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	70
		1.15 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	90
		1.16 Presentase temuan LHP BPK yang ditindak lanjuti pada Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	70%

Kegiatan : Dukung Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Deputy Bidang Pengembangan Pemuda
Anggaran Rp. 5.000.000.000

Jakarta, November 2023

Deputy Bidang Pengembangan Pemuda,

Sekretaris Deputy Bidang Pengembangan Pemuda,

Dr. Raden Isnanta, M.Pd.

Subroto, Ak. M.M., CA, CRGP, QIA.

Perjanjian Kinerja Sekretaris Deputy Bidang Pengembangan Pemuda

Nilai IKPA 2022

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM					
1	088	092	418138	BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA KEMENPORA	Nilai	100.00	27.51	71.07	74.03	63.64	76.36	100.00	100.00		78.37	100%	78.37
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10.00	2.75	14.21	7.40	6.36	7.64	5.00	25.00				
					Nilai Aspek	63.76		77.02					100.00				

Nilai IKPA 2023

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM					
1	088	092	418138	BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA KEMENPORA	Nilai	100.00	35.57	39.57	40.00	100.00	79.50	85.00	100.00		72.67	100%	72.67
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10.00	3.56	7.91	4.00	10.00	7.95	4.25	25.00				
					Nilai Aspek	67.79		68.81					100.00				

